

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

26 Januari 2006, sekitar kurang lebih 3000 rakyat palestina berbaris bersama dengan Hamas berjalan iring-iringan menuju Tepi Barat di kota Ramallah, menyuarakan slogan-slogan serta mengibarkan bendera yang berlogokan Hamas. Para penonton dari pihak organisasi Fatah menyaksikan peristiwa ini dengan perasaan tidak percaya. Karena pada malam sebelumnya, pendukung Fatah telah melakukan pesta perayaan di lapangan Manarah dan menembakkan pistol kemenangan ke udara. Menurut data polling yang telah diambil sebelumnya, Fatah akan memenangkan pemilu legislatif palestina dengan margin yang aman.¹

Namun pada keesokan harinya, justru Hamas lah yang merayakannya. Hasil menunjukkan ketidakakuratan hasil polling yang dilakukan oleh badan polling nasional palestina, dan Hamas memenangkan pemilu dengan marjin yang sangat jauh perbedaannya dengan faksi Fatah. Hamas pun mengangkat bendera tanda kemenangan dan dipasangnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Palestina. Tindakan ini memicu amarah dari pihak pendukung Fatah. Mereka berusaha keras untuk menurunkan bendera-bendera itu. Kejadian ini berlangsung selama 30 menit semenjak dimulainya pemasangan bendera itu dengan kedua

¹ Schanzer, Jonathan. *Hamas vs. Fatah : The Struggle for Palestine*. Palgrave Macmillan 2008, USA, hal. 1

pihak saling melempar batu dan memecah kaca-kaca hingga pihak Keamanan Palestina terpaksa menembakkan tembakan peringatan ke udara.

Beberapa bulan pasca pemilu, ketegangan antar kedua belah pihak semakin meningkat. Fatah, sebagai pemegang kendali tunggal pemerintahan Palestina semenjak awal berdirinya pada 12 November 1988² (Tepi Barat dan Gaza) menolak untuk menyerahkan kendali kekuasaan kepada pemenang pemilu. Hamas, sebagai pemenang pemilu bersikeras menyatakan resmi mendapatkan hak legitimasi untuk mengendalikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority (PA)) dan berhak untuk memerintah seluruh wilayah Palestina. Disinilah letak awal konflik keduanya semakin memburuk.

Lebih dari satu tahun berikutnya yakni pada tanggal 7 Juni 2007, pasukan yang loyal terhadap organisasi Hamas melancarkan serangan militer terhadap Fatah di Gaza, mengambil alih instalasi dan gedung pemerintahan Otoritas Palestina. Setelah empat hari melalui serangkaian pertempuran, pasukan bersenjata Hamas yang berpakaian serba hitam berhasil menguasai jalur-jalur utama di Gaza. Mereka menggali lubang-lubang di bawah gedung-gedung dan meledakkan bom-bom mematikan untuk menerobosnya. Hanya dibutuhkan waktu 6 hari, sampai seluruh Jalur Gaza bisa dikuasai seluruhnya oleh Hamas.

Banyak pihak yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Hampir keseluruhan berita yang muncul selama ini hanya terfokus pada isu konflik antara Israel dan Palestina. Masyarakat Palestina sering dipandang sebagai entitas yang satu seperti yang dikatakan sebagai “identitas satu Palestina” oleh

² Ibid, hal. 28

Rashid Khalidi, seorang professor studi Timur Tengah di Universitas Columbia.³ Namun pada kenyataannya, terdapat pandangan kritis dari hasil penelitian tentang sejarah Palestina, menunjukkan bahwa masyarakat Palestina sejatinya terbagi menjadi faksi-faksi, yang ditandai dengan perbedaan politik dan ideologi. Banyak analis yang meremehkan perbedaan ini dan menganggapnya sebagai faktor minor dan tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Dan kekerasan yang terjadi pada Juni 2007 merupakan manifestasi yang jelas akan terdapatnya perang sipil yang tak dideklarasikan secara langsung selama bertahun-tahun. Konflik antara kedua faksi itu bukan hanya menyangkut permasalahan konflik territorial, bukan pula merupakan kesalahpahaman. Kekerasan ini merupakan pertarungan perebutan kekuasaan antara dua rival faksi Palestina dengan ideologi yang sama sekali bertentangan antara satu dengan lainnya berkaitan dengan agama dan politik.⁴ Konflik ini menelan korban yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Perang saudara ini merenggut 161 nyawa penduduk sipil termasuk di dalamnya 7 anak dan 11 wanita. Dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka.

Konflik pun berlanjut dengan adanya penangkapan masing-masing anggota oleh aparat keamanan tiap pihak. Fatah misalnya, diperkirakan telah menangkap dan memenjarakan hampir mendekati jumlah 1000 orang anggota Hamas yang dicurigai terlibat. Penangkapan ini diwarnai isu kontroversi dimana seorang senior Hamas Majed Barghouti yang meninggal di dalam sel tahanan Otoritas Palestina. Disinyalir adanya praktek penyiksaan terhadap tahanan

³ Rashid Khalidi, *Palestinian identity : The Construction of Modern National Consciousness* (New York: Columbia University Press, 1997) hal. 193.

⁴ Schanzer, Jonathan. *Hamas vs. Fatah : The Struggle for Palestine*. Palgrave Macmillan 2008, USA, hal. 2

sehingga Hamas menuduh mereka melakukan tindak “*factional cleansing*”.⁵ Dan sebagai usaha untuk melemahkan pihak lawan, Otoritas Palestina memecat Imam masjid yang dianggap radikal dan mendukung Hamas. Mereka mengambil alih sejumlah kuasa masjid di Tepi Barat yang disinyalir merupakan milik yayasan Hamas. Bahkan, khutbah-khutbah di masjid pun mereka monitor untuk mencegah pengaruh mereka kepada rakyat sipil Palestina. Sebagai balasannya, Hamas juga menangkap dan menahan loyalis Fatah di Gaza dengan atau tanpa tuduhan yang jelas.

Dengan terblokadanya pemerintah Hamas di Gaza, mereka mencari jalan keluar pemecahan permasalahan ekonomi yang menjerat segenap penduduknya. Maka keputusan yang sulit akhirnya diambil dengan membuka keran kerjasama ekonomi serta bantuan dana dari Iran. Langkah ini dianggap oleh Fatah sebagai bentuk dukungan mereka dengan pemerintahan Syiah. Segera terjadi demonstrasi yang cukup besar di Gaza digerakkan oleh kelompok gerakan wanita Fatah. Mereka menolak keras kerjasama Hamas dengan pemerintah Syiah Iran. Sembari membawa balaheho berisi kata-kata profokatif, mereka meneriakkan kata “Syiah” sebagai tuduhan kepada Hamas bahwa mereka merupakan gerakan yang berafiliasi dengan Syiah dan berusaha menghancurkan umat Islam.⁶ Eskalasi konflik yang lebih besar mulai mengkhawatirkan Negara-negara Arab yang bertetangga. Konflik politis ini mulai mengarah kepada konflik ideologis dimana Hamas menuduh Fatah sebagai agen Kapitalisme Liberal, dan sebaliknya

⁵ Ali Waked, “Hamas: Palestinian Authority Worse Than Israel,” diakses dari Ynet News, 23 Februari, 2008. www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3510244,00.html

⁶ Paul Martin, “Hamas Carries Out Mass Arrest and Puts Down Gaza Schoolgirl Demo,” *Times of London*, diakses tanggal 13 November 2007, www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article2603259.ece

Fatah menuduh Hamas sebagai gerakan Syiah yang bertujuan menyebarkan pahamnya dan menghancurkan kaum Muslim dengan keengganannya untuk berdamai.

Untuk mencegah meluasnya konflik ini, beberapa kali negara-negara Arab mengupayakan rekonsiliasi. Seperti yang dilakukan oleh Saudi Arabia yang diinisiasi oleh Raja Abdullah pada tanggal 8 Februari 2007, mempertemukan Hamas dan Fatah di kota Makkah untuk menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai “*mecca agreement*”.⁷ Yaman mempertemukan kedua faksi di Sanaa, 23 Maret 2008. Selanjutnya, giliran Mesir yang mempertemukan mereka, pada 4 Mei 2011. Februari 2012, Emir Qatar yang mengambil inisiatif mempertemukan mereka di Doha.⁸ Namun semua usaha-usaha diatas tidak membuahkan hasil dan cenderung diabaikan oleh kedua belah pihak. Ada pula upaya Mesir untuk memulai upaya-upaya mediasi antara gerakan Hamas dan Fatah dalam rangka melanjutkan proses rekonsiliasi Palestina. Pertemuan, yang diluncurkan di bawah naungan Kepala Intelijen Mesir Mohammad Farid Al-Tohamy, akan membahas hal-hal dalam proses rekonsiliasi dan pekerjaan pemerintah koalisi di Gaza, yang tertunda, yang dipimpin oleh Rami Al-Hamdallah, kata Kantor Berita Timur Tengah (MENA). Pertemuan tersebut membahas penerapan kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya antara kedua

⁷ Ibid hal.102

⁸ <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/11/na4sum2-rekonsiliasi-hamasfatah-dan-sabotase-israel>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2014

pihak, blokade Gaza dan rekonstruksi yang disebabkan oleh serangan Israel baru-baru ini di kota Gaza, di samping masalah Pemilu.⁹

Walaupun rekonsiliasi sempat tercapai di tahun 2011 yang merupakan usaha selama 4 tahun semenjak tahun 2007, namun hal tersebut tidak berlangsung lama.¹⁰ Kemesraan kedua pihak yang baru sesaat itu selalu terganggu oleh tekanan dan tindakan represif dari internal dan eksternal. Dari pihak eksternal yakni Israel beberapa kali mengupayakan usaha kegagalan rekonsiliasi tersebut. Mulai dari pernyataan penolakan, lalu usaha untuk menciptakan situasi kekacauan dengan mengarahkan tuduhan penculikan warganya kepada Hamas, memberikan tekanan kepada Fatah bahwa rekonsiliasi tersebut diluar konteks prasyarat perdamaian dan akan menggagalkan perdamaian mereka,

Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, beberapa usaha pun dilakukan dari intern mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Haniyyah dengan mengucapkan selamat kepada faksi Fatah pada peringatan hari ulang tahunnya, dan menegaskan Hamas telah mempersilakan dan menjaga sepenuhnya perayaan ulang tahun Fatah di Jalur Gaza. Ini merupakan perayaan pertama di Gaza sepanjang usia 48 tahun Fatah. Sebaliknya, untuk pertama kalinya pula sepanjang 26 tahun ulang tahun Hamas, diselenggarakan di Tepi Barat yang notabene mayoritas dikuasai Fatah. Sementara itu, *TV Nasional* pada awal tahun 2014 menyiarkan pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang intinya mengajak seluruh faksi perjuangan Palestina untuk mempererat persatuan nasional.

⁹ <http://www.antaraneews.com/berita/455286/hamas-fatah-mulai-berunding-di-kairo> , diakses pada tanggal 25 September 2014

¹⁰ <http://www.dw.de/apakah-rekonsiliasi-hamas-fatah-akan-berumur-panjang/a-15056460> , diakses pada tanggal 06 Mei 2011

Dalam pidato Hari Ulang Tahun Revolusi Palestina ke-49 tersebut, Abbas juga menyerukan seluruh faksi menciptakan pemerintahan bersama dan segera menetapkan tanggal pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.¹¹

Perjanjian persatuan Hamas-Fatah akhirnya dapat disepakati pada bulan April tahun 2014. Kesepakatan Hamas-Fatah tersebut, mengakhiri persaingan selama tujuh tahun antara Abbas yang mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat, dengan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza. Dua faksi utama Palestina yang bersaing telah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri tujuh tahun aksi-aksi kekerasan dalam rangka membuka jalan bagi pemilihan umum dan pembentukan pemerintah Palestina dalam beberapa pekan ke depan. Hamas dan Fatah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan "bersejarah" untuk mengakhiri perbedaan dan membentuk pemerintah persatuan Palestina.¹²

Kesepakatan itu diumumkan sehari setelah delegasi senior Palestinian Liberation Organisation (PLO) tiba di Jalur Gaza mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Hamas dalam upaya menemukan jalan mengakhiri sengketa Hamas - Fatah dan rekonsiliasi nasional. Delegasi PLO terdiri dari perwakilan dari berbagai faksi dan dipimpin oleh pejabat senior faksi Fatah, Azzam al - Ahmed. Perjanjian terbaru ini ditandatangani di rumah Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh di kamp pengungsi Shati di Jalur Gaza.¹³

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak akan bekerja

¹¹ <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/tahun-rekonsiliasi-palestina/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2014

¹² <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/hamas-dan-fatah-berdamai-bentuk-pemerintahan-palestina> diakses pada Kamis, 24 April 2014

¹³ Ibid

mengimplementasikan kesepakatan mereka sebelumnya di Qatar dan Mesir. Berdasarkan kesepakatan itu, kedua belah pihak setuju untuk membentuk pemerintah konsensus nasional teknokrat yang mulai beroperasi pada 2 Juni.¹⁴

Banyak pihak yang terheran-heran akan tercapainya rekonsiliasi kali ini, karena Hamaslah yang membuka diri dan mengajak Fatah untuk berunding. Memang, perjanjian antara Fatah dan Hamas ini bukan yang pertama. Kedua belah pihak telah mencoba untuk meraih kesepakatan berulang kali namun perjanjian serupa tidak pernah diterapkan.¹⁵ Terlebih lagi, sejarah mencatat bahwa konflik perebutan politik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan bahkan ideologi ini membuat pesimis banyak pihak akan tercapainya rekonsiliasi keduanya menjadi sebuah pemerintahan yang bersatu. Meski demikian, nyata jelas bahwa rekonsiliasi telah tercapai di tahun 2014. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dinilai lebih bersifat konkret ketimbang perjanjian-perjanjian rekonsiliasi sebelumnya. Untuk membentuk pemerintahan Palestina yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang di atas penulis hendak mempertanyakan. Mengapa rekonsiliasi Hamas dan Fatah pada tahun 2014 berhasil dicapai?

¹⁴ <http://liputanislam.com/berita/hamas-fatah-dan-ancaman-retaknya-rekonsiliasi/> , diakses pada 9 September 2014

¹⁵ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140423_palestina_israel, diakses pada tanggal 23 April 2014

C. Landasan Teori

Teori Rekonsiliasi Konflik

Rekonsiliasi konflik adalah suatu usaha untuk menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbaharui hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang harmonis pada masa yang akan datang. Dalam tingkat komunitas dan nasional, Rekonsiliasi bisa dianggap sebagai suatu gerakan yang lebih kooperatif.¹⁶ Pada bagian berikutnya, konsep rekonsiliasi akan di paparkan lebih rinci menurut 5 aspek.

pertama Rekonsiliasi berdasarkan model pendekatan teoritik, merujuk pada salah satu model *Rational choice* atau *Game theory*, *Human Need Theory*, dan *forgiveness model*. *Kedua*, lingkup Rekonsiliasi merujuk pada pelbagai aspek hubungan (identitas, sikap, keyakinan dan perilaku). *Ketiga*, merujuk pada pelbagai aspek kebutuhan sosial dari pihak yang terlibat konflik (keadilan, kebenaran, penyembuhan dan rasa aman). Dan *keempat*, tingkatan rekonsiliasi, yang merujuk pada tingkatan intervensi rekonsiliasi, apakah pada tingkat interpersonal, komunitas dan nasional. *Terakhir*, rekonsiliasi dari pendekatan dari bawah (*Bottom-up approach*) ataukah dari atas (*top down approach*).

Model rekonsiliasi yang bertolak dari teori pilihan rasional ataupun teori permainan (game theory) berangkat dari asumsi maksimalisasi kegunaan. Dasar teori ini adalah bahwa masyarakat ataupun aktor (atau individu yang bertindak atas nama kolektiva), adalah pelaku yang rasional, yang akan bertindak untuk

¹⁶ Melor & Bretherton, *Reconciliation*, 2003, Hal. 39

mencapai hasil maksimal yang bisa dicapai dari setiap interaksinya. Dalam konteks rekonsiliasi, terutama dalam konteks pertikaian internasional (international disputes), rekonsiliasi dapat dipahami sebagai tindakan atau keputusan terbaik yang menguntungkan semua pihak yang didapat dari suatu proses perundingan yang rasional.

Dalam pandangan teori ini, rekonsiliasi dapat dipandang sebagai pilihan aktor politik yang mengambil manfaat maksimal untuk keuntungan pribadi atas nama kepentingan publik. Asumsi pengambilan keputusan secara rasional (rational decision making) adalah sebagai berikut: 1) aktor mempunyai tujuan tertentu; 2) tujuan tersebut merefleksikan kepentingan aktor; 3) individu mempunyai kecenderungan yang konsisten dan stabil; 4) jika ada pelbagai macam pilihan, actor akan memilih alternatif yang akan memberikan keuntungan maksimal; 5) aktor dengan kepentingan politik adalah pemain terpenting.¹⁷

Menurut model pilihan rasional ini, keputusan untuk perang atau rekonsiliasi sangat ditentukan oleh pola pertukaran (trade-off) dan perhitungan untung-rugi (estimation of costs and benefits).¹⁸ Menurut model ini, pemulihan hubungan baik adalah konsekuensi dari tercapainya pilihan-pilihan rasional dalam suatu negosiasi untuk mencapai suatu penyelesaian konflik (conflict settlement negotiation). Karena model ini sangat mengandaikan pada asumsi rasionalistik, segala sesuatu yang menyangkut kerugian harus bisa ditakar dan direkompensasi secara hitungan yang rasional.

¹⁷ William J. Long, Peter Brecke, *War and Reconciliation: Reason and Emotion in Conflict Resolution*, MIT Press, 2003 hal.121 / 73

¹⁸ Ibid

Rekonsiliasi pada intinya memperbaiki hubungan antara kelompok-kelompok yang terpecah karena konflik. Dalam tingkat komunitas dan nasional, rekonsiliasi bisa dianggap sebagai suatu gerakan untuk mencapai hubungan yang lebih kooperatif. Empat hal utama selayaknya menjadi inti tahapan dari rekonsiliasi. *Pertama*, mengembalikan hakikat kemanusiaan kelompok, bahkan perpetrator sekalipun. Dengan kata lain, harus ada kesediaan untuk menata kembali identitas dan pendefinisian ulang hubungan antar kelompok. Dalam hal ini hak asasi dan kemanusiaan harus mendapat prioritas utama. *Kedua*, rekonsiliasi harus dipahami sebagai penataan ulang tatanan moral baru, yang bertitik tolak dari adanya konsensus mengenai nilai-nilai yang menyokong kerjasama. *Ketiga*, pentingnya perubahan sikap (*attitudinal aspect*) dan keyakinan (*belief*). Perubahan sikap dan belief adalah penting supaya seorang bisa mengatasi rasa ketakutan, rasa marah, dan dendam yang membuat konflik berkepanjangan. Keempat, pola interaksi dengan kelompok musuh harus direorientasi ulang ke arah hubungan saling tergantung yang menguntungkan. Kelompok harus berani mengambil resiko untuk memulai kontak baru supaya mulai timbul rasa percaya satu sama lain.

Dimensi rekonsiliasi yang paling tampak jelas adalah pada aspek perilaku, yaitu bagaimana pola interaksi antar kelompok selama, saat dan setelah proses rekonsiliasi. Pola interaksi yang dikehendaki adalah yang tidak lagi menunjukkan pola berkonflik (seperti eskalasi kekerasan dan curiga) namun lebih ke arah interaksi yang kooperatif. Harus ada peningkatan kualitas yang lebih baik. Mulai

adanya pertukaran barang dan jasa antar kelompok misalnya, bisa menjadi indikator mulai tumbuhnya pola interaksi yang positif.¹⁹

Pola tingkah laku dan sikap saling terkait untuk satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jarangnya interaksi misalnya, akan memperkuat sikap berprasangka dan timbulnya stereotip. Rasa saling tidak percaya sangat bergantung pada apakah pola interaksi masih terisolasi satu sama lain, dan tidak adanya komunikasi yang terbuka. Tingkah laku negatif yang ditampilkan oleh salah satu pihak akan memperkuat sikap negatif kelompok lainnya, dan sikap negatif ini akan memicu pola interaksi yang negatif. Sebaliknya pola interaksi yang positif akan meningkatkan rasa percaya kelompok untuk interaksi dan berani mengambil resiko yang lebih dari hubungan antar kelompok. Pola hubungan timbal balik yang positif pada akhirnya adalah modal utama untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) dikemudian hari. Dimensi-dimensi rekonsiliasi konflik adalah menyangkut ruang lingkup yang perlu diubah (identitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku). Dua dimensi lainnya yang juga perlu diperhatikan dan dibahas lebih detail adalah komponen substantif dari rekonsiliasi (keadilan, kebenaran, penyembuhan dan rasa aman), dan pada tingkatan mana intervensi diperlukan (individual, komunitas, atau nasional).

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dimensi ruang lingkup memperlihatkan tingkat kedalaman perubahan dimana rekonsiliasi dapat dilakukan. Apakah hanya perubahan sikap, nilai atau perilaku atau sudah sampai pada perubahan identitas. Rekonsiliasi yang superfisial misalnya hanya

¹⁹ [scribd.com/doc/58858189/4/Rekonsiliasi-dan-Resolusi-Konflik,2010](https://www.scribd.com/doc/58858189/4/Rekonsiliasi-dan-Resolusi-Konflik,2010), diakses pada 15 september 2012

menyentuh perubahan sikap dan perilaku, sementara transformasi kesadaran dan identitas antara kelompok-kelompok yang belum tercapai. Dimensi kedua dalam rekonsiliasi adalah komponen atau unsur-unsur substantif yang perlu diperhatikan dalam proses rekonsiliasi. Unsur substantif ini berkaitan dengan model kebutuhan manusia (*human needs theory*). Artinya unsur-unsur kebutuhan berikut harus dijadikan agenda dalam proses rekonsiliasi. Unsur-unsur itu menyangkut kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan/pemulihan (*healing*) dan rasa aman (*security*).

Dimensi berikutnya menyangkut pada tingkat sosial tempat rekonsiliasi akan dilakukan, apakah pada tingkat individual, komunitas, atau nasional. Isu penting seputar dimensi ini adalah pada perdebatan diseputar pertanyaan pada tingkat mana itu rekonsiliasi harus dilakukan. Apakah rekonsiliasi pada suatu tingkatan tertentu mempengaruhi atau menjadi presenden untuk tingkat tingkat lainnya. Persoalan tingkat ini juga jadi sangat relevan jika di kaitkan dengan strategi dan ideologi rekonsiliasi, apakah dimulai dari bawah (*bottom up strategy*) atau dari atas kebawah (*top down strategy*).²⁰

Teori Negosiasi

Untuk memahami perilaku politik Hamas dan Fatah, maka penulis akan memakai kacamata teori negosiasi. Secara definisi, negosiasi adalah “bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Kata

²⁰ Ibid

negosiasi ini digunakan untuk menggambarkan situasi *win-win solution* seperti yang terjadi ketika dua pihak mencoba untuk menemukan solusi agar dapat saling diterima pada konflik yang kompleks. Negosiasi terjadi ketika pihak-pihak lebih memilih untuk menciptakan solusi mereka sendiri demi menyelesaikan konflik, ketika tidak ada seperangkat aturan atau prosedur yang tetap yang dibuat untuk menyelesaikan konflik, atau ketika mereka memilih untuk mengabaikan aturan-aturan tersebut.²¹

Dalam menguraikan permasalahan yang terjadi antara dua faksi besar Palestina tersebut, penulis akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan negosiasi integratif yakni rekonsiliasi politik Hamas dan Fatah. Faktor-faktor yang membantu keberhasilan Negosiasi Intergratif ada enam :

1. Adanya tujuan yang sama

Kedua belah pihak yakin bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan bekerja sama daripada dengan bersaing atau bekerja terpisah. Ada tiga jenis tujuan bersama –*common goal* yang berarti tujuan yang dimiliki kedua belah pihak dan dapat mendapatkan keuntungan yang tidak mungkin mereka dapatkan jika mereka tidak bekerjasama,

shared goal yakni tujuan yang sama-sama dimiliki oleh kedua pihak tetapi memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak dengan cara yang berbeda, *dan*

²¹ Lewiski, Roy J. Barry, Bruce. Saunders, David M. *Negosiasi edisi 6*. Penerbit Salemba Humanika, 2012. Hal. 117

joint goal yaitu tujuan yang melibatkan individu-individu yang memiliki tujuan pribadi yang berbeda yang setuju untuk menggabungkan tujuan mereka ke dalam usaha kolektif- .

2. Keyakinan pada kemampuan penyelesaian masalah

Orang-orang yang percaya bahwa mereka dapat bekerja sama, mereka akan menginvestasikan waktu dan tenaga untuk potensi keuntungan yang didapatkan dari hubungan kolaborasi.

3. Keyakinan pada validitas posisi pihak lain

Selain yakin pada validitas posisi sendiri bahwa hal yang diyakini layak diperjuangkan dan tidak dapat dikompromikan, tetapi juga menerima validitas perspektif pihak lain.

4. Motivasi dan komitmen untuk bekerja sama

Kedua pihak hendaknya termotivasi untuk berkolaborasi dan bukan untuk bersaing. Kedua pihak dalam negosiasi memaksimalkan hasil mereka ketika mereka memiliki sikap mengutamakan diri sendiri yang aktif dan sehat dalam mencapai tujuan sendiri sekaligus mengakui bahwa mereka sedang dalam hubungan kolaborasi penyelesaian masalah.

5. Kepercayaan

Kepercayaan sangat bergantung pada bagaimana perilaku kedua pihak dan sebagian tergantung pada karakteristik pribadi kedua pihak. Ketika orang saling mempercayai, mereka akan lebih mudah berbagi informasi dan berkomunikasi secara akurat tentang kebutuhan, posisi, dan fakta-fakta tentang situasi.

6. Komunikasi yang jelas dan akurat

Komunikasi yang terbuka untuk berbagi informasi tentang diri mereka dan bersedia ungkapkan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

Sementara Robert C. Kelment menyatakan bahwa keberhasilan perundingan akan tergantung pada bagaimana menciptakan suatu momen yang tepat. Momen yang tepat bagi suatu perundingan akan sangat bergantung pada :

1. Prinsip dan Pragmatis (*Principle and pragmatism*) artinya sebelum memasuki perundingan pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal prinsip yang telah menjadi sengketa. Untuk mencapai kesepakatan yang prinsip ini maka diperlukan komitmen (*commitment*) dan tanggung jawab moral untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketa secara timbal balik. Inti dari komitmen itu sendiri dengan dimensi moral bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan menaati hasil perundingan. Sebelum ada kesepakatan maka berarti belum terdapat momentum yang tepat bagi kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Sedangkan pragmatis (*pragmatism*) sebagai prasyarat tercapainya perdamaian, atau menurut Kelment "*pragmatism is sine qua non for a mutually acceptable peace*" artinya perundingan tersebut harus pragmatis atau mudah untuk dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak sehingga terwujud perdamaian". Terdapat tiga pragmatisme yang akan memegang peranan dalam proses perundingan perdamaian :

- a. Adanya keterpaksaan tekanan (*compulsion*) yang membuat pihak – pihak yang bersengketa bersedia untuk berunding. Kondisi ini akan dapat menciptakan momentum yang tepat untuk melakukan perundingan.
 - b. Pragmatisme yang dilandasi adanya jaminan masa depan yang lebih baik (*vision of the future*), yang artinya suatu perundingan dianggap pragmatis apabila memenuhi adanya jaminan masa depan yang lebih baik bagi kedua belah pihak meski mereka harus mengorbankan sesuatu terlebih dahulu.
 - c. Pragmatisme dilandasi oleh adanya kepentingan (*interest*) yang apabila masing-masing pihak sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk memecahkan status quo, akan berdampak membahayakan kedua pihak sehingga perlu diubah.
2. Keberhasilan suatu perundingan tergantung pada komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgement*)²². Pengakuan eksistensi kebangsaan atau kelompok masing-masing akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti diluar inti yang menjadi sengketa mereka seperti masalah prinsip yang mereka sengkatakan.

D. Hipotesa

Maka dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu di atas disertai kerangka berfikir yang sistematis, penulis menarik suatu hipotesa

²² <http://www.infopalestina.com indeksberita.asp>, 106

sementara dari fenomena ini. Faktor-faktor yang mendukung proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah adalah :

1. Pertimbangan pilihan yang rasional dari Hamas dan Fatah untuk mengambil kebijakan rekonsiliasi terkait pengaruh opini publik Palestina, tekanan ekonomi, serta perubahan peta politik dunia.
2. Keproduktifitasan mediator dalam memediasi Hamas dan Fatah.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Dimana metode ini berusaha untuk memberikan data-data atau bukti-bukti yang terkait dengan faktor yang mendukung proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Selain dengan menunjukkan data-data yang didapat, penulis berusaha memaparkan dan menggambarkan data-data melalui penjelasan terhadap temuan kasus-kasus yang ada.

Pemberian bukti yang jelas beserta penjelasan yang mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terkait bukti-bukti yang dipaparkan menjadi poin penting mengenai mekanisme metode penelitian kuantitatif. Tujuan dari metodologi ini untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mendukung proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah adalah dengan memberikan data-data berupa penjelasan tentang hubungan antara variabel-

variabel yang terdapat dalam proses rekonsiliasi yang terjadi pada tahun 2011 untuk mencari jawaban atas proses rekonsiliasi pada tahun 2014.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penulisan yang penulis peroleh dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik sekunder adalah berupa buku pustaka, surat kabar, artikel-artikel ilmiah, situs internet serta sumber-sumber valid dan relevan bagi penulis.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ini bertujuan untuk Mengembangkan dan mengamalkan keilmuan selama belajar di perguruan tinggi serta menambah wawasan intelektual sebagai mahasiswi setelah menerima ilmu-ilmu selama kuliah.
2. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa tentang kehidupan politik dua faksi besar Palestina yang dari awal berdirinya sudah diwarnai dengan konflik.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung proses rekonsiliasi hamas dan fatah.
4. Di samping itu penulisan ini juga di buat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini rencananya akan terdiri dari lima bagian, **bab I** berupa pendahuluan akan berisi Latar belakang masalah, mengenai perpecahan yang terjadi antara dua faksi besar Palestina yakni Hamas dan Fatah akibat perbedaan ideologi serta perbedaan pemahaman terhadap interaksi mereka dengan Israel.

Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai pembatas kajian agar fokus terhadap penelitian ini, untuk mengupas masalah secara ilmiah maka peneliti menggunakan landasan teori terhadap bab ini. Kemudian metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan memberikan bukti-bukti yang terkait mengenai faktor pendukung dalam rekonsiliasi serta penjelasan terkait dengan penyebab munculnya faktor-faktor tersebut.

Kemudian pada **bab II** dengan tema Dinamika konflik Hamas dan Fatah akan membahas sejarah berdirinya organisasi Hamas, tujuan terbentuknya serta segala macam pokok pikiran dan gerakan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Begitu pula dengan penjelasan awal perpecahannya dengan Fatah serta tindakannya terkait perlawanan dengan Israel. Lalu tentang Fatah, dan Politik Otoritas Palestina berisi tentang latar belakang berdirinya organisasi ini yang bermula dari sekedar Gerakan Pembebasan *Palestinian Liberation Organization* dan perkembangannya hingga deklarasi kemerdekaan Palestina dan berubah menjadi institusi resmi pemerintahan Palestina. Kemudian tujuan

berdirinya serta langkah-langkah politik tokoh pergerakan yang berjuang demi kemerdekaan Palestina hingga munculnya Tokoh Yasir Arafat.

Selanjutnya pada **bab III** akan dibahas dinamika rekonsiliasi konflik yang pernah dilakukan sepanjang sejarah perjalanan interaksi Hamas dan Fatah. Dijelaskan pula macam-macam perjanjian rekonsiliasi yang pernah dicapai, hingga sebab-sebab kegagalan tercapainya kesepakatan

Pada **bab IV** akan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Pertama berisi sebab-sebab dua faksi itu mengambil pilihan Rational Choice dengan mengambil kebijakan rekonsiliasi. Lalu sub bab berikutnya akan membahas tentang kelihaiian Negara-negara Arab dalam menerapkan strategi mediasi yang mendorong terlaksananya rekonsiliasi.

Bab V berisi kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan berupa jawaban penjelasan mengenai pertanyaan yang di jadikan dasar dalam rumusan masalah. Penulis berusaha memberikan jawaban mengenai faktor-faktor yang mendukung proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah pada Tahun 2014. Serta kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.